

FORMAT
SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGAJUAN SPM DI LUAR BATAS WAKU

KOP SURAT SATKER

Nomor : Tanggal, bulan, tahun
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Pengajuan SPM
Di Luar Batas Waktu

Yth. Direktur Pelaksanaan Anggaran/Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah *

Sehubungan dengan terjadinya keterlambatan pengajuan SPM Tahun Anggaran 2022, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

No.	Kode/ Nama KPPN	Kode/ Nama Satker	Jenis SPM	SPM			Alasan keterlambatan	Keterangan **/**
				Nomor	Tanggal	Nilai (Rp.)		

1.

-
- Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon agar diberikan persetujuan pengajuan atas SPM dimaksud.
- Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen bukti penolakan/pengembalian SPM dari KPPN.
- Pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban, pelaporan atas SPM sebagaimana tersebut pada angka 1, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat
Eselon I penanggung jawab
Program/Pejabat pada unit Pembina
Keuangan TNI/POLRI

Nama

Catatan :

*) Pilih salah satu sesuai kewenangan

**) Dapat berupa Jaminan

***) untuk jenis SPM LS Kontraktual diisi Nomor Tanggal BAPP/BAST

FORMAT
SURAT PERNYATAAN KETERLAMBATAN PENGAJUAN SPM

KOP SURAT SATKER

SURAT PERNYATAAN KETERLAMBATAN PENGAJUAN SPM
NOMOR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP/NRP :

Unit Organisasi :

Kementerian/ Lembaga :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

No.	Kode/ Nama KPPN	Kode/ Nama Satker	Jenis SPM	SPM			Alasan keterlambatan	Keterangan **/**
				Nomor	Tanggal	Nilai (Rp.)		

1. Terdapat keterlambatan pengajuan SPM berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-08/PB/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2022, dengan rincian *) sebagai berikut:
2. Pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan atas SPM diatas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

	 Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Eselon I penanggung jawab Program/Pejabat pada unit Pembina Keuangan TNI/POLRI
--	--

Materai
Rp.10.000

(Tanda tangan)
(Nama Jelas)
NIP/NRP

*) Dapat berupa lampiran